

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM	20
A. Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi	20
B. Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia	23
C. Sejarah <i>Judicial Review</i> di Indonesia.....	31
D. Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi	34
E. Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi	34
F. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi	40
G. Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi	42
H. Pemilihan Umum (Pemilu).....	45
BAB III TINJAUAN TEORITIS.....	51
A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.....	51
1. Substansi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.....	51
2. Kekuatan Mahkamah Konstitusi	52
3. <i>Judicial Review</i> Atau Pengujian Mahkamah Konstitusi	54
4. Penafsiran Mahkamah Konstitusi.....	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi	63
6. Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	67
7. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	71
B. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak.....	72
1. Filosofi Keputusan.....	72
2. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-XI/2013 Menurut Analisis Perundang-Undangan di Indonesia.....	80
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	92
A. Pemberlakuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Hubungannya Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak.....	72
B. Status Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	109
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN